

ANALISIS KINERJA SATKER PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU SUKABUMI JAWA BARAT

Dewi Indri Hapsari^{*)}, Abdul Rosyid, dan Trisnani Dwi Hapsari

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang (email : dewiindrihapsari@rocketmail.com)

ABSTRAK

Pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi dokumen perizinan usaha penangkapan, hasil tangkapan, anak buah kapal, *loog book* perikanan, daerah penangkapan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan serta yang berkaitan dengan penangkapan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi fungsi dan peran kinerja Satker PSDKP, serta menganalisis Menganalisis kegiatan Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif berdasarkan studi kasus. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus.

Hasil penelitian yang didapat kinerja Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah dikatakan baik karena, tugas pokok yang ada pada masing-masing pegawai telah dilaksanakan akan tetapi untuk pengawasan di laut dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan adanya sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk melakukan pengawasan tersebut. Perlu penambahan jumlah armada *speed boat* untuk menunjang kinerja pengawasan Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Kata Kunci : Pengawasan; Kinerja; Satker PSDKP; PPN Palabuhanratu

ABSTRACT

Fisheries surveillance of fishing areas are Civil Servants (PNS) were given the duties, responsibilities, authority, rights in full by the competent authorities to conduct surveillance of fishing activities include licensing documents fishing effort, the catch, the crew, loog book fishery, region capture, utilization of fish resources and the environment and other related arrest.

The purposes of this study were to identify the functions and roles of PIU PSDKP performance, and analyze the activities of Satker Supervision Analyzing Marine Resources and Fisheries in the Palabuhanratu Nusantara fishing port, Sukabumi, West Java. The method used in this research was descriptive based on case studies. The sampling method used was census.

The results obtained performance of Satker Monitoring of Marine Resources and Fisheries has said as well, that is the fundamental duty of each employee would have held but for surveillance at sea can be said to be less good. This is due to the facilities and infrastructure that are not conducive to such monitoring. Need to increase the number of speed boat fleet to support performance monitoring Satker Monitoring of Marine Resources and Fisheries.

Keywords : Surveillance; Performance; Satker PSDKP; PPN Palabuhanratu

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu secara geografis terletak pada posisi $6^{\circ}50' - 6^{\circ}55'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}25' - 106^{\circ}50'$ Bujur Timur, sedangkan secara administrasi di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu terdapat 4 (empat) kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok. Perairan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu sangat potensial dan strategis bagi perikanan tangkap hal ini didukung dengan hasil tangkapan yang didapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu tergolong dalam ikan yang bernilai ekonomis tinggi sebagai contoh: ikan layur, ikan tuna, tongkol, kakap, tenggiri, dan ikan kecil lainnya (DKP Sukabumi, 2006).

Potensi sumberdaya ikan yang ada di Palabuhanratu mengalami kenaikan pada tahun 2009 didapatkan 3.950.257 kg, sementara pada tahun 2010 didapatkan 6.744.292 kg. Hal ini menunjukkan bahwa Palabuhanratu sangat potensial bagi perikanan tangkap (PPN Palabuhanratu, 2011).

Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan dimulai pada tahun 1994, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Dirjen Perikanan Nomor 320 tahun 1994 tentang Penunjukkan Petugas Pengawas Kapal Ikan dan Nomor 420 tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal Ikan, selanjutnya diperkuat dan disempurnakan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 996 tahun 1999 perihal yang sama. Sejalan dengan perkembangan kebijakan negara Indonesia pada tahun 2000, terbentuk Kementerian Eksplorasi Laut dan Perikanan yang salah satu tugas pokok dan fungsi di dalamnya adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Perlindungan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan kapal perikanan. Sebagai dasar pelaksanaan petugas pengawas perikanan di lapangan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44/MEN/2001 tentang

Pengalihan Pembinaan Teknis Pengawas Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya tahun 2002 dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.996 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan menjadi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP No.18/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan dan Nomor: KEP.03/MEN/2002 tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/DJ-SATKER PSDKP/V/2004 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian *Log Book* Perikanan dan Lembar Laik Operasional Kapal Perikanan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat optimal terutama pengawasan terhadap kapal perikanan di pelabuhan pangkalan. Pada umumnya kegiatan penangkapan dimulai dari pelabuhan pangkalan sebagai pusat dimulainya aktivitas kegiatan bagi kapal perikanan yang meliputi pengisian bahan bakar minyak, perbekalan logistik, pendaratan hasil tangkapan, pergantian ABK dan sebagainya. Pengawasan terhadap kapal perikanan dilakukan di pelabuhan pangkalan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen perijinan, pemeriksaan fisik kapal di lapangan dan alat tangkap serta ikan hasil tangkapan yang dituangkan dalam bentuk Surat Laik Operasi (SLO) sebagai dasar persyaratan penerbitan Surat Izin Belayar (SIB) dan laporan penangkapan atau *Log Book* Perikanan (LBP) pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut wajib diisi dengan benar oleh nahkoda. Selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan

pada saat mendarat kembali ke pelabuhan pangkalan. Data dan informasi dari proses pengawasan kapal perikanan selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi terjadi pelanggaran perikanan dilakukan penyidikan.

Permasalahan yang timbul dari kinerja pengawasan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, yang meliputi sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, insentif, motivasi. Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan mengenai kinerja Satker PSDKP maka dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dalam penerapannya dilakukan pengkajian berdasarkan dokumen-dokumen kapal (*ship documents*) yang harus ada di kapal terkait masalah keselamatan kapal yaitu Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, disamping itu juga dilakukan pula observasi lapangan terhadap kapal-kapal penangkap ikan di PPN Palabuhanratu untuk melihat kelengkapan persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh kapal dalam upaya mencapai keselamatan kelaikan dan pengawasan kapal penangkap ikan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi fungsi dan peran kinerja Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
2. Menganalisis kegiatan Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus dan satuan kasusnya

adalah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Menurut Salim (2000), metode deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Metode Pengambilan Sampel

Metode Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dimana populasi pegawai Satker PSDKP yang ada diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel. Sampel yang diambil sebanyak 8 orang yang menjadi pegawai Satker PSDKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah sampel yang diambil terdiri dari 2 orang penyidik, 1 orang pengawas, dan 5 orang sebagai pegawai administrasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Menurut Nasution (2003), metode ini adalah mengadakan observasi menurut kenyataan, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Umar, 1997).

Observasi di lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana kondisi di lapangan serta apa saja yang mempengaruhi kinerja Satker PSDKP di PPN Palabuhanratu.

2. Metode wawancara

Menurut Santoso (2005), wawancara merupakan suatu proses

interaksi dan komunikasi dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Responden penelitian adalah pegawai Satker PSDKP di PPN Palabuhanratu. Metode wawancara ini dibantu dengan *tape recorder* yang digunakan untuk merekam semua pembicaraan/wawancara yang dilakukan. Sedangkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa upaya dalam mencapai optimalisasi kinerja pengawasan Satker PSDKP di PPN Palabuhanratu.

3. Metode studi pustaka

Metode studi pustaka ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang

Secara geografis PPN Palabuhanratu terletak di $06^{\circ} 97^{\circ} - 07^{\circ} 03^{\circ}$ LS, $106^{\circ} 59'' - 106^{\circ} 62''$ BT. Wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu mencapai sekitar 55.615 hektar atau sebesar 49,50 % dari luas wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi atau sebesar 16,68 % dari total luas Kabupaten Sukabumi. Potensi sumberdaya ikan yang ada di Palabuhanratu mengalami kenaikan pada tahun 2009 didapatkan 3.950.257 kg, sementara pada tahun 2010 didapatkan 6.744.292 kg. Memperhatikan potensi perikanan, terutama di wilayah Selatan pulau Jawa pengembangan perikanan di wilayah pantai Selatan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi masih terbuka luas. Wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang sebagian daerahnya memiliki laut yang sangat luas dan memiliki batas-batas wilayah perairan (PPN Palabuhanratu, 2011).

Menurut DKP (2005), pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di laut dialokasikan dalam bentuk perizinan penangkapan ikan di tiap wilayah pengelolaan

mendukung penelitian sehingga diharapkan dengan landasan teori yang kuat akan diperoleh pemahaman yang baik. Metode tersebut dapat digunakan untuk mencari data-data sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang didapatkan dari lapangan.

4. Metode dokumentasi

Metode ini bersifat primer dan sekunder serta dilaksanakan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, buletin dan sebagainya (Nazir, 2005).

Data yang diambil dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yakni, data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

perikanan sesuai dengan potensi yang dapat dimanfaatkannya. Sejalan dengan makin intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan, maka upaya pengawasan terhadap pemanfaatan tersebut perlu ditingkatkan, agar pelanggaran peraturan dibidang perikanan dapat ditekan dan penegakan hukum dapat dilakukan semaksimal mungkin. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan merupakan amanat dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. penurunan akibat usaha penangkapan yang terus meningkat.

a. Terdapat 2 orang personil pengawas berkewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yakni Enco Mulyarasa, S.IP dan Asep Suryana, S.IP, 1 orang adalah calon pengawas yakni Muhammad Rifki, S.Pi serta 5 orang Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan struktur organisasi pada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Palabuhanratu yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Satker PSDKP Palabuhanratu sebagai pengawas perikanan muda yang berkewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki tugas pokok untuk mengkoordinir atau mengarahkan staf pengawas lain sesuai tugas dan fungsinya, dan bertanggung jawab langsung kepada Pangkalan Satker PSDKP Jakarta sebagai Unit di atasnya;
2. Penyidik sebagai pengawas perikanan penyelia yang berkewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memiliki tugas pokok untuk melakukan pemasangan, pemantauan dan operator VMS (*Vessel Monitoring Sistem*) yang berada di kapal-kapal perikanan;
3. Pengawas sebagai calon pengawas perikanan yang memiliki tugas pokok sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran, Penanggungjawab Pengadministrasian, dan Penanggungjawab Laporan Kegiatan; dan
4. Anggota sebagai tenaga kerja kontrak yang memiliki tugas pokok sebagai petugas administrasi. Keberadaan Tenaga Kerja Kontrak di Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Palabuhanratu tersebut masih dibutuhkan dalam rangka menunjang operasional pengawasan.

Tugas yang ada dari masing-masing pegawai Satker PSDKP tersebut, sebagian besar tugasnya telah dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya Kepala Satker PSDKP yang memiliki tugas pokok mengkoordinir dan mengawasi stafnya sudah dilaksanakan dengan baik. Bisa dikatakan baik karena, Kepala Satker PSDKP selalu mengingatkan stafnya yang lalai dalam bekerja untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan yang sudah menjadi tugasnya. Sedangkan untuk pengawasan di laut, kurang baik karena selama ini pengawasan yang

harusnya dilakukan 3 bulan sekali belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target karena terbentur oleh terbatasnya sarana yang ada yaitu *speed boat*. Sarana *speed boat* yang ada hanya 1 yang dimiliki oleh pihak Satker PSDKP itupun dengan kondisi rusak ringan.

Penyidik yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pemasangan, pemantauan dan operator VMS (*Vessel Monitoring Sistem*) yang berada di kapal-kapal perikanan dapat dikatakan cukup baik. Bisa dikatakan cukup baik karena, semua kapal yang memenuhi persyaratan yang terdapat di PPN Palabuhanratu telah dipasang VMS. Dari kapal yang berjumlah 15 diatas 30 GT, telah dipasang VMS. Salah satu kendala yang dialami penyidik adalah kurang tertibnya para nelayan yang belum memasang VMS serta belum ada tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang belum memasang VMS. Masih terdapat kapal yang tidak memperpanjang VMS kendalanya antara lain adalah biaya yang mahal.

Pengawas yang mempunyai tugas pokok sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran, Penanggungjawab Pengadministrasian, dan Penanggungjawab Laporan Kegiatan sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena sebagian besar tugasnya sudah dilaksanakan, akan tetapi laporan bulanan yang berisi mengenai kegiatan Satker PSDKP yang telah dilaksanakan tiap bulannya belum tercapai. Serta untuk data pelanggaran kapal yang ada juga belum dicantumkan sesuai yang semestinya.

Anggota sebagai tenaga kerja kontrak yang berjumlah 5 orang, yang memiliki tugas pokok sebagai petugas administrasi dapat dikatakan baik. Dapat dikatakan baik karena, apapun yang menjadi tugasnya seperti pencatatan kapal masuk dan kapal keluar, penerbitan SLO, pembukuan, dan lain-lain telah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya.

Luas wilayah pengawasan seluas 16 mil dari tepi pantai hingga 55.615 wilayah pesisir yang ada membuat pengawasan yang dilakukan kurang maksimal. Hal ini disebabkan adanya jumlah sarana dan prasarana seperti *speed boat* dan *handy talky* yang kurang, serta jumlah anggaran biaya yang kurang untuk pemenuhan perbekalan dalam pengawasan di laut. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah maupun pegawai Satker PSDKP, pemerintah harus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang sehingga dapat menunjang kinerja pegawai Satker PSDKP. Dibutuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk bisa meningkatkan kinerja Satker PSDKP serta didukung kemampuan dalam melakukan pengawasan tersebut.

b. Kegiatan Satker PSDKP

Salah satu contoh kegiatan yang telah dilakukan selama ini adalah pengawasan pencemaran air, kegiatan ini meliputi pengawasan wilayah perairan dari dampak pencemaran oleh faktor-faktor lingkungan sekitarnya maupun oleh faktor manusia. Secara umum di wilayah perairan selatan Jawa Barat khususnya di sekitar Teluk Palabuhanratu, pencemaran tidak terlalu signifikan.

Pencemaran perairan yang terus diawasi sampai saat ini adalah proses *dredging* pada proyek PLTU oleh PLN yang membuang tanah/pasir hasil kerukan ke wilayah perairan Teluk Palabuhanratu. Lokasi pembuangan hasil kerukan ini berada pada wilayah yang tidak berada pada *fishing ground* dimana nelayan sekitar mencari ikan.

Kegiatan pengawasan yang lain salah satunya adalah pengawasan muatan kapal perikanan dilakukan pada kapal perikanan yang berlabuh di PPN Palabuhanratu dengan memeriksa fisik serta dokumen

kapal. Sampai saat ini belum ditemukan kasus mengenai muatan kapal yang melanggar ketentuan, baik membawa alat tangkap yang dilarang maupun perbedaan alat tangkap dengan ijin, maupun ikan hasil tangkapan sesuai dengan alat tangkap pada kapal perikanan.

c. Prosedur

Prosedur pengawasan di darat yang dilakukan oleh petugas Satker PSDKP di PPN Palabuhanratu tersaji dalam lampiran 3. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap no. 4356 tahun 2006, prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dibagi menjadi 3 tahap, meliputi:

1. Terhadap kedatangan kapal perikanan
 - a. Setiap kapal perikanan yang akan memasuki pelabuhan perikanan wajib terlebih dahulu memberitahukan kedatangannya kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
 - b. Pemberitahuan kedatangan kapal dilakukan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum kapal memasuki pelabuhan perikanan.
 - c. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah menerima pemberitahuan kedatangan kapal agar segera mengatur tempat tambat atau labuh kapal perikanan.
 - d. Setiap kapal yang telah masuk di pelabuhan perikanan baik tambat labuh maupun labuh selambat-lambatnya 2 jam setelah masuk wajib menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan untuk disimpan selama kapal

- perikanan berada di pelabuhan perikanan.
- e. Segera setelah menerima dokumen kapal perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan wajib memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang merupakan tugas Syahbandar di pelabuhan perikanan.
2. Terhadap keberangkatan kapal perikanan
 - a. Setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan perikanan wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana keberangkatannya kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
 - b. Pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum kapal perikanan berangkat dari pelabuhan perikanan.
 - c. Setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan, Syahbandar perikanan segera memeriksa dokumen kapal perikanan dan memeriksa kelengkapan di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b dan c.
 - d. Hasil pemeriksaan sebagaimana bulir c di atas merupakan dasar pertimbangan untuk menertibkan Surat Ijin Berlayar (SIB).
 - e. Setiap kapal perikanan yang telah menerima Surat Ijin Berlayar (SIB) wajib segera berangkat atau meninggalkan pelabuhan perikanan.
- d. Kinerja

Menurut Laporan Tahunan Satker PSDKP (2011), kinerja yang dilakukan pihak Satker PSDKP di PPN Palabuhanratu sebagai berikut:

 1. Pengawasan pada unit usaha penangkapan ikan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen perijinan berupa Surat Ijin Penangkapan/Pengangkut Ikan (SIPI/SIKPI), Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS (pada kapal ≥ 30 GT), serta pemeriksaan fisik kapal apakah sesuai dengan dokumen perijinannya.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kapal yang dipasang VMS

No	Nama Kapal	Nama Perusahaan	ID	Kode Lapor	Tahun Pemasangan
1	KM. Surya Gemilang II	Kholili	0016	J 271944	09.03.2010
2	KM. Bintang Barat 88	Winata	0017	L 133354	12.03.2010
3	KM. Jaya Mitra VI	Mukito	0018	P 154707	24.07.2010
4	KM. Perintis Jaya 88	PT. Perintis Jaya Internasional	0019	H 243584	29.07.2010
5	KM. Wastu Kencana I	Dinas Perikanan Jabar	0020	B 340576	10.08.2010
6	KM. Merauke Gemilang	Kholili	0031		04-01-2010
7	KM. Naga Jaya III	Kaslim	0032		03-12-2009
8	KM. Bintang Bahari 88	Mukito	0033		25-11-2009
9	KM. Hasil Terus II	Tie Sioe Foeng	0034		25.11.2009
10	KM. Surya Gemilang	Kholili	0035	L 493358	09.03.2010
11	KM. Jaya Mitra VII	Mukito	0056	L 721505	17.08.2010
12	KM. Gunawan 28 Jaya III	Ang Ping Ha	0057	F 780422	19.10.2010

No	Nama Kapal	Nama Perusahaan	ID	Kode Lapor	Tahun Pemasangan
13	KM. Velya	Wiro Edi Valentino Gunawan	0058	F 315573	28.10.2010
14	KM. Yong Putra 18	Bing Haryo	0059	L 357006	17-11-2010
15	KM. Jaya Mitra	Hendri	0060	F 593671	24.02.2011

Sumber : Laporan Tahunan Satker PSDKP, 2011.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.03/MEN/2007 Tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan, SLO merupakan surat keterangan kelayakan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/eksporasi perikanan, dan operasi pendukung penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan.

Tabel 2. Rekapitulasi Surat Laik Operasional (SLO), Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) di Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Palabuhanratu Tahun 2011

No.	Bulan	HPK A (Kedatangan kapal)	HPK B (Keberangkatan kapal)	SLO
1.	Januari	48	48	45
2.	Februari	39	39	37
3.	Maret	50	50	50
4.	April	56	56	50
5.	Mei	54	54	49
6.	Juni	48	48	39
7.	Juli	53	53	47
8.	Agustus	41	41	33
9.	September	39	39	38
10.	Oktober	38	38	37
11.	November	41	41	38
12.	Desember	52	52	49
Jumlah		559	559	512

Sumber : Laporan Tahunan Satker PSDKP, 2011.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.03/MEN/2007 Tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan, SLO merupakan surat keterangan kelayakan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/ eksporasi perikanan, dan operasi pendukung penangkapan dan atau pembudidayaan ikan.
4. Kegiatan pengawasan di darat Kegiatan Satker PSDKP yang dilakukan di darat, meliputi:
- Memeriksa kelengkapan dokumen kapal.
 - Memeriksa keabsahan dokumen izin perikanan melalui validasi dengan data perizinan.
 - Memeriksa fisik kapal dan alat tangkap.
 - Menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO).
 - Mengkoordinasi pengawasan atas penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan
 - Mencatat Surat Ijin Berlayar (SIB) terbit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satker PSDKP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dari Satker PSDKP antara lain sebagai tempat untuk menerbitkan SLO serta mempunyai peran sebagai pengawas sumberdaya laut yang ada.
2. Kinerja Satker PSDKP yang ada di PPN Palabuhanratu dapat dikatakan baik karena, sebagian besar tugas pokok yang ada pada masing-masing pegawai telah dilakukan. Akan tetapi, untuk kegiatan pengawasan di Laut tidak baik karena, pengawasan di laut tidak dilaksanakan secara semestinya dengan fasilitas yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Satker PSDKP PPN Palabuhanratu dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penangkapan, serta perlu dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya kelengkapan surat-surat tersebut.
2. Perlu adanya penambahan fasilitas *speed boat* untuk menunjang kegiatan pengawasan di Laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atharis, Yoliza. 2008. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus Sumatra Barat.[Skripsi]. IPB. Bogor.
- Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap Satker Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2011. Sukabumi.
- Dinas Perikanan dan Kelautan, 2006. Analisis Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan.DKP. Sukabumi
- DKP. Laporan Tahunan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2005. Ditjen pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Ratnawati. 2010. Studi Pengembangan Kapasitas Institusional Pokmaswas dalam Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang di Kab. Pangkep. Jurnal Mitra Bahari 4(2) : 2-12.
- Santoso, Gempur. 2005. Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif). Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Supranto. 2003. Metode Riset. Rineka Cipta. Jakarta.
- Umar, H. 1997. Riset Akuntansi Panduan Lengkap Untuk Membuat Skripsi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 2008. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.